



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Analisis Performance Based Accountability* pada Sistem
**Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bogor****

Skripsi

Oleh

Ninda Fauziah

2017310133

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

***Analisis Performance Based Accountability* pada Sistem
Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bogor**

Skripsi

Oleh

Ninda Fauziah

2017310133

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP, MPA

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ninda Fauziah
Nomor Pokok : 2017310133
Judul : Analisis *Performance Based Accountability* pada Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah
Atas (SMA) di Kota Bogor

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 5 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si. :  _____


Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. :  _____

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. :  _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ninda Fauziah
NPM : 2017310133
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Performance Based Accountability pada
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di
Kota Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juli 2021



Ninda Fauziah

ABSTRAK

Nama : Ninda Fauziah

NPM : 2017310133

Judul : Analisis *Performance Based Accountability* pada Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Kota Bogor

Pada tahun 2017 pemerintah membentuk sebuah kebijakan Penataan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disebut sebagai sistem zonasi. Meskipun sistem zonasi PPDB dirancang untuk melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, namun terdapat berbagai indikasi masalah akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan alur berpikir tersebut penelitian ini diarahkan untuk melihat akuntabilitas kinerja sistem zonasi PPDB.

Untuk melihat akuntabilitas kinerja pada sistem zonasi PPDB, digunakan model *performance based accountability*. Model ini memiliki delapan dimensi yang terdiri dari kejelasan outcome, kejelasan output, mekanisme pengukuran kinerja, keterkaitan program dengan output dan outcome, kejelasan standar kinerja, mekanisme perbaikan kinerja, kejelasan tanggung jawab kinerja, dan menghubungkan input dengan output. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus. Kedalaman informasi diperoleh dari berbagai aktor yang terkait dengan program sistem zonasi PPDB antara lain pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kota Bogor dan sekolah SMA Negeri 9 Kota Bogor) melalui wawancara mendalam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan terkait akuntabilitas kinerja sistem zonasi PPDB. 1) Sistem zonasi PPDB belum memiliki kejelasan tujuan yang konsisten dan terfokus pada masalah sebelum adanya kebijakan ini. 2) Akses dan cakupan program masih menjadi kendala dalam sistem zonasi PPDB 3) Sekolah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan kriteria efektivitas dan efisiensi. 4) Output dan outcome program sistem zonasi tidak saling terkait karena masih banyak kendala dalam output yang dihasilkan. 5) Sistem zonasi PPDB belum mencapai target kinerja yang sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan. 6) Pelaksanaan sistem zonasi PPDB semakin kondusif setiap tahunnya. 7) Individu menjalankan tugas sesuai yang dibebankan dan telah mencapai target kinerja 8) Dukungan input atau sumber daya belum memadai untuk mencapai output zonasi sekolah. Saran yang diberikan peneliti yaitu pemerintah harus memiliki konsistensi tujuan yang ditetapkan berdasarkan masalah kebijakan yang jelas. Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan sumber daya pada pemenuhan kualitas SDM maupun infrastruktur dan pemerintah dapat menjamin validitas data kependudukan.

Kata kunci: *Performance Based Accountability*, PPDB, sistem zonasi

ABSTRACT

Name : Ninda Fauziah

NPM : 2017310133

Title : *Analysis Performance-Based Accountability on the New Student Admission Zoning System (PPDB) for High School Level (SMA) in Bogor City*

In 2017 the government established a New Student Admission Arrangement (PPDB) policy known as the zoning system. Although the PPDB zoning system is designed to provide equity and improve the quality of education services, there are various indications of performance accountability problems in the implementation of the program. Based on this line of thinking, this research is directed to look at the accountability of the PPDB zoning system performance.

To see performance accountability in the PPDB zoning system, a performance based accountability model is used. This model has eight dimensions consisting of outcome clarity, output clarity, performance measurement mechanism, program linkage with outputs and outcomes, clarity of performance standards, performance improvement mechanisms, clarity of performance responsibilities, and linking inputs to outputs. The research method used in this study is a qualitative case study method. The depth of information was obtained from various actors related to the PPDB zoning system program, including the local government (Bogor City Education Office and Bogor City Senior High School 9) through in-depth interviews.

Based on the research that has been done, several findings were obtained regarding the accountability of the PPDB zoning system performance. 1) The PPDB zoning system did not yet have clear, consistent and problem-focused objectives prior to this policy. 2) Access and program coverage are still an obstacle in the PPDB zoning system. 3) Schools measure performance based on effectiveness and efficiency criteria. 4) The output and outcome of the zoning system program are not interrelated because there are still many obstacles in the output produced. 5) The PPDB zoning system has not achieved the performance target in accordance with the goal of equal distribution of education. 6) The implementation of the PPDB zoning system is getting more conducive every year. 7) Individuals carry out tasks as assigned and have achieved performance targets 8) Insufficient input or resource support to achieve school zoning outputs. The advice given by the researcher is that the government must have a consistent goal set based on clear policy issues. The government also needs to strengthen resource support in fulfilling the quality of human resources and infrastructure and the government can guarantee the validity of population data.

Key word: Performance Based Accountability, PPDB, Zoning System

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis (Papa, Mama, dan Iqbal) yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, bantuan, serta doa kepada penulis,
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bantuan berupa arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini,
3. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis,
4. Staff Dinas Pendidikan Kota Bogor yang telah membantu penulis untuk memperoleh data,
5. Tenaga Pendidik SMA Negeri 9 Kota Bogor yang telah membantu penulis memberikan beberapa informasi,
6. Narendra Elsalis Zulilmi yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

7. Desti Krisnasakti, Anastasia Belinda, Yollanda Firza, dan Cecilya Widiyani yang selalu menemani dan membantu dalam masa perkuliahan
8. Tanti, Nahla, Nabila, Meilyn, dan Riri selaku teman seperbimbingan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Ica, Tasya, dan Wildan selaku sahabat yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan kesan dan banyak bantuan saat masa perkuliahan

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung, 16 Juli 2021

Penulis,

Ninda Fauziah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Program Pemerataan Pendidikan di Sektor Publik.....	15
2.3 Akuntabilitas Kinerja Program di Sektor Publik.....	19
2.4 Akuntabilitas Kinerja Program Berdasarkan <i>Performance Based Accountability</i>	22
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Peran Peneliti	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Sumber Data.....	28
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	30

3.6 Analisis Data.....	32
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	34
3.8 Operasionalisasi Variabel	35
BAB IV	40
PROFIL PENELITIAN.....	40
4.1 Program Zonasi Sekolah.....	40
4.1.1 Tujuan Zonasi Sekolah.....	40
4.1.2 Manfaat Zonasi Sekolah.....	41
4.1.3 Sasaran Sistem Zonasi Sekolah	41
4.2 Prosedur dan Tahapan Program Zonasi Sekolah.....	42
4.3 Profil Pengelola Program.....	46
4.3.1 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	46
4.3.2 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Kota Bogor	49
BAB V.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1 Kejelasan Outcome yang diharapkan pada Program Zonasi Sekolah	51
5.2 Kejelasan Output Program Zonasi Sekolah	53
5.2.1 Akses	54
5.2.2 Cakupan.....	55
5.2.3 Bias.....	56
5.2.4 Kesesuaian Program Zonasi dengan Kebutuhan	57
5.3 Terdapat Mekanisme Pengukuran Kinerja Program Zonasi yang Efektif ...	58
5.3.1 Terdapat Mekanisme Pengukuran Kinerja yang Efektif	58
5.3.2 Mekanisme Pengukuran Kinerja Dapat dipertanggungjawabkan.....	60
5.4 Keterkaitan Program Zonasi Sekolah dengan Output dan Outcome	60
5.4.1 Terdapat Perencanaan Pelaksanaan Program Zonasi Sekolah Berdasarkan Output dan Outcome.....	61
5.4.2 Pelaksanaan Zonasi Sekolah dijalankan Berdasarkan Output dan Outcome	62
5.5 Kejelasan Standar Kinerja Program Zonasi Sekolah.....	63
5.6 Terdapat Perbaikan Kinerja Program Zonasi Sekolah	66
5.7 Kejelasan Tanggung Jawab Kinerja	66
5.8 Menghubungkan Input dengan Output	67
BAB VI.....	69

KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah di Indonesia Tahun 2018.....	3
Tabel 1. 2 Presentase Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020.....	4
Tabel 1. 3 PPDB Kota Bogor Periode 2020	8
Tabel 5. 1 Keadaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Menurut Status Sekolah di Kota Bogor	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 Akreditasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bogor	64
Grafik 5. 2 Pemerataan Guru PNS di Kota Bogor	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Zonasi Sekolah A, B, C Kota Bogor	43
Gambar 4. 2 Zonasi Sekolah D, E, F Kota Bogor	44
Gambar 4. 3 Jadwal PPDB Jalur Zonasi SMA Tahun 2020	45
Gambar 4. 4 Alur Pendaftaran PPDB Tahun 2020	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan sebuah pedoman yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat. Adanya kebijakan publik dilandasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau ketetapan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini juga tidak berbeda dengan definisi yang dikemukakan James E. Anderson terkait kebijakan publik, yaitu sebuah tindakan yang diikuti oleh aktor atau kelompok dalam memecahkan masalah.¹

Kebijakan publik merupakan suatu instrument untuk menyelenggarakan suatu kepentingan publik serta menjadi bagian yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut karena lingkup kebijakan publik sangat luas yang mencakup berbagai sektor pembangunan, salah satunya di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Pendidikan juga menjadi hak konstitusional bagi setiap individu yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Secara jelas, kebijakan pendidikan memiliki peran yang fundamental dan menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Keputusan yang

¹ Idris Patarai. 2020. Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. De La Macca. Hlm 19

diambil dalam kebijakan pendidikan akan menentukan kualitas mutu pendidikan pada setiap tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan orientasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadikan kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik.

Pendidikan sendiri merupakan hal penting dalam suatu negara, karena tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Pendidikan, manusia akan memiliki wawasan yang luas mengembangkan kemampuan yang dapat menunjang kehidupan. Pendidikan yang baik akan menjamin terciptanya sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.

Pendidikan juga menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan. Oleh sebab itu bidang pendidikan menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tepatnya tujuan ke-4 yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.²

Pembangunan pendidikan masih berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat sudah mulai

² BPS. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Hlm 4

meningkat, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarwilayah dan pembelajaran yang berkualitas masih belum berjalan optimal dan merata diseluruh wilayah. Berdasarkan masalah tersebut, pemerintah belum dapat melaksanakan tugasnya dengan akuntabel sebab kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat yang memiliki hak atas pendidikan belum terlaksana.

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah di Indonesia Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
SD	131.974	16.270	148.244
SMP	23.227	15.733	38.960
SMA	6.732	6.763	13.495
SMK	3.519	10.191	13.710

Sumber: Data Statistik Pendidikan Kemendikbud, 2018

Dalam upaya pemerataan layanan pendidikan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Beberapa program sudah dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, namun hal tersebut belum mampu mengatasi masalah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

**Tabel 1. 2 Presentase Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan,
Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020**

Jenjang Pendidikan	TA 2018/2019			TA 2019/2020		
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat
SD	27,40	63,91	8,69	13,59	78,79	7,63
SMP	31,28	61,32	7,40	17,13	77,53	5,35
SMA	44,53	51,36	4,12	27,10	70,20	2,70
SMK	47,35	50,78	1,87	29,88	68,62	1,50

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan table 1.2, pada tahun ajaran 2019/2020 terhitung ada lebih dari 70% ruang kelas di setiap jenjang pendidikan mengalami kondisi rusak. Hal yang lebih memprihatinkan adalah ruang kelas dengan kondisi baik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya pada seluruh jenjang pendidikan. Perbaikan terhadap kondisi sekolah yang rusak harus mendapat perhatian pemerintah, karena jika dibiarkan target pendidikan yang diharapkan tidak akan tercapai.

Kondisi lain yang menyebabkan pemerataan pendidikan belum berjalan secara optimal yaitu angka siswa putus sekolah yang mencapai 223.882 anak.³ Semakin tinggi jenjang, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh daerah tempat tinggal yang tertinggal, kemiskinan, serta belum optimalnya sarana pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan akses pelayanan Pendidikan. Salah satu diantara beberapa upaya tersebut merupakan adanya kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk sebuah kebijakan untuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan tersebut adalah sistem zonasi yang digunakan dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang

³ Kemendikbud. *Percepatan Peningkatan Akses dan Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan* [PPT File]. Diakses dari web <file:///C:/Users/User/Downloads/FMB9%20KEMENDIKBUD%20-%20Semua%20Bisa%20Sekolah.pdf> pada 30 Mei 2021

diterima. Sisanya, sekolah akan menerima peserta didik baru di luar zonasi sebanyak 10% dengan masing-masing presentase 5% jalur prestasi dan 5% perpindahan domisili orang tua/wali.⁴

Sistem zonasi diterapkan untuk menjamin adanya penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan adil demi meningkatkan akses layanan pendidikan. Dengan demikian, sistem zonasi diharapkan dapat mengubah paradigma status “sekolah unggulan” yang menimbulkan adanya tatanan kasta dalam sistem Pendidikan di Indonesia. Adanya penerapan sistem ini, pemerintah memiliki konsekuensi untuk menyiapkan pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).⁵

Sistem zonasi baru diberlakukan secara efektif pada tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, kebijakan sistem zonasi dinilai masih memiliki kendala di berbagai daerah, salah satunya adalah Kota Bogor. Pada tahun 2019, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) untuk menolak zonasi sekolah pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini dilakukan dengan alasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi memiliki banyak kelemahan, khususnya paling banyak terjadi di tingkat

⁴ Kemendikbud. 2018. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Diakses dari web http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 14.15

⁵ Ibid, Hlm 3

SMA.⁶

Pertama, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi memicu terjadinya praktik maladministrasi. Dugaan ini dibuktikan dengan temuan beberapa calon siswa terindikasi melakukan praktik manipulasi data kependudukan. Terdapat tiga nama calon siswa yang terdaftar dalam sistem PPDB online di SMA Negeri 1 Kota Bogor dengan alamat yang sama.⁷

Persoalan ini disebabkan pemikiran calon siswa yang beranggapan jarak terdekat akan lebih mudah diterima oleh sekolah dibandingkan dengan kerja keras mereka untuk mendapatkan nilai yang baik. Kasus ini pun menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB di Kota Bogor belum sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sistem zonasi yaitu, penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan akuntabel.

Kendala lain yang dihadapi pada pelaksanaan sistem zonasi di Kota Bogor yaitu jumlah sekolah negeri di Kota Bogor saat ini masih kurang sehingga belum bisa menampung seluruh siswa. Jumlah sekolah negeri yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah calon siswa yang akan mendaftar pada sekolah selanjutnya. Alhasil, mayoritas calon siswa harus melanjutkan pendidikan ke

⁶ Achmad, Sudarno. 2019. *Wali Kota Bogor Sebut Sistem Zonasi PPDB SMA Ada Kelemahan, Ini Alasannya*. Diakses dari web <https://www.liputan6.com/news/read/4002482/wali-kota-bogor-sebut-sistem-zonasi-ppdb-sma-ada-kelemahan-ini-alasannya> pada 30 Mei 2021 pukul 15.23

⁷ Achmad Sudarno. *Wali Kota Bogor Sebut Sistem Zonasi PPDB SMA Ada Kelemahan, Ini Alasannya*, *Liputan6 News*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4002482/wali-kota-bogor-sebut-sistem-zonasi-ppdb-sma-ada-kelemahan-ini-alasannya> pada 23 Juni 2021 pukul 21.01

sekolah swasta.

Tabel 1. 3 PPDB Kota Bogor Periode 2020

Sekolah	Kota Bogor	
	Jumlah Calon Siswa	Daya Tampung Sekolah
SD	17.000	14.556
SMP	11.875	2.954
SMA	9.569	2.160

Sumber: Diolah oleh peneliti dari website resmi PPDB online Kota Bogor

Berdasarkan data pada table 1.3, dapat dilihat bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan sebaran sekolah yang belum merata. Secara jelas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah belum dapat menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Persoalan lain terkait proses pelaksanaan program zonasi yaitu, penerimaan peserta didik baru dirasakan oleh masyarakat tidak berjalan dengan adil. Masyarakat menyuluhkan komposisi penilaian dalam sistem zonasi yang diterapkan pada tingkat SMP Kota Bogor berbeda dengan tingkat SMA yang kewenangannya ada pada Provinsi. Untuk tingkat SMA, tidak diberlakukan skoring seperti pada tingkat SMP sehingga pelaksanaan seleksi hanya melihat jarak pada sekolah. Hal tersebut menyebabkan penurunan mutu pada siswa karena nilai ujian nasional

dirasa tidak diperlukan lagi.⁸

Banyaknya pengadua kecurangan terkait pelaksanaan sistem zonasi PPDB 2019, Bima Arya meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi sistem PPDB. Menurutnya, sistem PPDB yang berlaku saat ini terlalu ambisius, sedangkan sistem pendukung pelaksanaan program belum siap.⁹ Akibatnya tujuan pemerataan layanan pendidikan tidak akan tercapai.

Pada dasarnya, sistem zonasi merupakan strategi pemerintah yang dianggap dapat mempercepat pemerataan pelayanan sektor Pendidikan. Kebijakan ini telah melalui pengkajian matang serta memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel,¹⁰ Adanya program zonasi sekolah diharapkan mampu untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada layanan pendidikan.

Meskipun telah melalui pengkajian yang cukup panjang, program zonasi sekolah belum sepenuhnya terlaksana secara akuntabel dan mencapai tujuannya. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

⁸ Dede Susianti. *Tahun Depan, Pemkot Bogor Tolak Zonasi PPDB SMA*, *Media Indonesia*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/244510/tahun-depan-pemkot-bogor-tolak-zonasi-ppdb-sma> pada 23 Juni 2021 pukul 22.11

⁹ Windiyanti, R. Sumardiyani. 2019. *Dugaan Manipulasi Administrasi PPDB di Kota Bogor Menyeruak*. Diakses dari web <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01314193/dugaan-manipulasi-administrasi-ppdb-di-kota-bogor-menyeruak> pada 30 Mei 2021 pukul 15.46

¹⁰ KOMINFO. *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. Diakses dari web https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr pada 17 Juni 2021 pukul 15.08

1. Memicu praktik maladministrasi

PPDB jenjang SMA memicu praktik maladministrasi dengan memanipulasi data kependudukan agar jarak domisili lebih dekat dengan sekolah yang di daftar.

2. Sebaran sekolah yang belum merata

Saat ini jumlah SMA Negeri di Kota Bogor tidak sebanding dengan jumlah calon siswa yang ingin mendaftar ke sekolah negeri. Hal tersebut terjadi setiap memasuki tahun ajaran baru karena minat calon siswa yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak.

3. Proses seleksi berjalan tidak adil

Terjadi perbedaan proses seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP dengan jenjang SMA. Pada jenjang SMA kewenangan terdapat dari provinsi, sehingga pihak sekolah merasa kesulitan. Proses seleksi pada jenjang SMA tidak melakukan skoring sehingga hanya melihat jarak pada sekolah. Hal ini menyebabkan penurunan mutu siswa karena nilai ujian nasionalnya menjadi kecil dengan adanya zonasi tersebut.

Berdasarkan temuan di atas dapat dipahami bahwa terdapat indikasi masalah akuntabilitas pada sistem zonasi PPDB, terutama akuntabilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Beberapa permasalahan seperti praktik manipulasi data, sebaran sekolah yang tidak merata, dan proses seleksi yang berjalan tidak adil justru bertolak belakang dari tujuan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan alur berpikir tersebut, penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja program. Secara

spesifik penelitian ini diarahkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pada Kebijakan Program Zonasi Sekolah di Kota Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas kinerja Sistem Zonasi PPDB jenjang sekolah menengah atas di Kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi khususnya bagi penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang akuntabilitas kinerja pada program layanan pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen evaluasi dan masukan bagi instansi pelaksana terkait layanan pendidikan . Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian baru terkait kinerja Dinas Pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mengetahui pembahasan umum dari

setiap bagian penelitian.

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab I akan dijelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan penelitian, fokus masalah penelitian, tujuan diadakannya penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Pada bab II berisi uraian mengenai teori sebagai jawaban teoritis dari rumusan masalah yaitu mengenai kebijakan publik, program pemerataan pendidikan di sektor public, akuntabilitas kinerja program di sektor public, dan akuntabilitas kinerja program berdasarkan *performance based accountability*.

BAB III: METODE PENELITIAN. Pada bab III berisi uraian mengenai cara yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian seperti tipe penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan operasionalisasi variable.

BAB IV: PROFIL PENELITIAN. Pada bab IV berisi uraian mengenai profil Kebijakan Program Zonasi Sekolah di Kota Bogor.

BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab V berisi uraian mengenai hasil temuan di lapangan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab VI berisi uraian mengenai kesimpulan temuan di lapangan serta saran untuk hasil temuan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA: Berisi mengenai sumber apa saja yang digunakan dalam penelitian ini